

KAJIAN KEMANDIRIAN SEKOLAH DI AMAL USAHA MUHAMMADIYAH

H. Muhammad Joko Susilo, M.Pd.
Program Studi Pendidikan Biologi
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
jokoms_uad@yahoo.com

ABSTRACT: This study aims to find a formula in the form of school autonomy in Muhammadiyah School based on the search results in Muhammadiyah policy. The independence of the school is a form of independent school with muhammadiyah character.

This article follow the activities of research and development of 4D with 3 phases, namely: (1) pre-stage development (including include: gathering information on the studies that have been done before, reviewing the literature and make a field), (2) stage of development (concerning with activities: determining the direction of products, development, manufacture plan model), and (3) the stage of implementation of the model (including: pilot activities, the implementation of the development, and dissemination). However, this article only raised the first stage, pre-development with technical and policy assessments in Muhammadiyah School, then performed the content analysis of the data found.

The assessment results obtained that the independence of the schools in the form of Muhammadiyah Independent Schools can be realized if it is preceded by the school principal policy for increasing school autonomy that leads to quality improvement; measure independence in the independent school of Muhammadiyah version is (a) an orderly worship (al-Islam), (b) proficient reading and writing the Quran, (c) a national paradigm (d) academic knowledge is high, (e) skills in foreign languages and (f) computer skills; a form of autonomy in Muhammadiyah school management is independence curriculum, learning and teaching, educators, funding and school facilities.

Keywords: Assessment, Independence School, Muhammadiyah

ABSTRAK: Pengkajian ini bertujuan untuk menemukan formula kemandirian sekolah dalam bentuk sekolah muhammadiyah yang didasarkan atas hasil penelusuran kebijakan di persyarikatan muhammadiyah. Kemandirian sekolah yang dimaksud adalah wujud dari sekolah kategori mandiri yang berkarakter muhammadiyah.

Penulisan artikel ini mengikuti alur kegiatan penelitian pengembangan 4D dengan 3 tahapan, yakni: (1) tahap pra pengembangan (termasuk di dalamnya mencakup: pengumpulan informasi mengenai penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, mengkaji literatur, dan melakukan observasi lapangan), (2) tahap pengembangan (menyangkut kegiatan: penentuan arah produk, pengembangan, pembuatan rencana model), dan (3) tahap penerapan model (termasuk di dalamnya: kegiatan uji coba, implementasi pengembangan, dan diseminasi). Namun, artikel ini hanya mengangkat tahap pertama yaitu pra pengembangan dengan teknis pengkajian kebijakan dimuhammadiyah dan sekolah muhammadiyah, selanjutnya dilakukan content analisis atas data-data yang ditemukan.

Hasil pengkajian diperoleh bahwa kemandirian sekolah yang berupa sekolah mandiri muhammadiyah dapat terwujud apabila diawali dengan adanya kebijakan kepala sekolah untuk peningkatan daya kemandirian sekolah yang mengarah pada peningkatan mutu; tolok ukur kemandirian dalam sekolah mandiri versi muhammadiyah adalah (a) tertib ibadah (al-islam), (b) mahir baca tulis al-quran, (c) berwawasan kebangsaan, (d) pengetahuan akademis tinggi, (e) ketrampilan berbahasa asing dan (f) ketrampilan komputer; wujud kemandirian dalam manajemen sekolah muhammadiyah berupa kemandirian kurikulum, kegiatan belajar mengajar, tenaga pendidik dan kependidikan, pembiayaan, dan fasilitas sekolah.

Kata kunci: Pengkajian, Kemandirian Sekolah, Muhammadiyah

PENDAHULUAN

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern di Indonesia sudah lebih dari satu abad telah dan terus berkiprah di berbagai bidang

terutama bidang pendidikan, agama, sosial, dan kesehatan dengan misi dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan pembaharuan (*tajdid*) yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah

sehingga masyarakat Islam yang sebenarnya dapat diwujudkan, bahkan semakin menunjukkan kekuatan-kekuatannya sebagai *agent of change* dan gerakan moral (*moral force*). Bidang pendidikan di organisasi muhammadiyah dibuktikan dengan banyaknya sekolah muhammadiyah yang didirikan hampir setiap penjuru tanah air hingga di tingkat internasional. Amal usaha Muhammadiyah dibidang pendidikan terdiri dari 172 perguruan tinggi (universitas, sekolah tinggi, dan akademi), 1143 SMA/SMK/MA, 1772 SMP/MTs, 2604 SD/MI, 7623 TK ABA, 6723 PAUD, 71 SLB, 82 Pondok Pesantren (Haedar Nashir, 2013:12).

Sekolah Muhammadiyah dalam pelaksanaan proses pendidikan diharapkan menghasilkan profil lulusan yang berakhlakul karimah, cerdas, dan terampil dengan mengedepankan kualitas kemandirian dalam menghadapi tantangan global. Untuk itu, berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan senantiasa dilakukan, seperti: mengembangkan manajemen sesuai dengan dinamika sekolah, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan menjadikan sekolah sebagai laboratorium hidup untuk membentuk masyarakat madani, serta membangun kemandirian sekolah muhammadiyah.

Fakta di lapangan masih banyak sekolah muhammadiyah yang belum berkualitas karena rendahnya kemandirian sekolah sehingga menyebabkan ketergantungan sekolah yang tinggi. Sekolah muhammadiyah saat ini memiliki ketergantungan kepada pemerintah atau pihak-pihak luar (terutama personil kependidikan, dana, sarana dan prasarana hingga manajemen sekolah), melemahnya militansi tenaga pengelola menyebabkan minimnya semangat kemandirian dan berkorban untuk memajukan umat manusia melalui pendidikan. Urgensi kemandirian sekolah tak akan lepas dari komponen-komponen penyusun sekolah, seperti: kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, kesiswaan, sarana prasarana, keuangan, layanan khusus, dan *stakeholders* sekolah. Kemandirian sekolah akan memberikan muara pada kualitas lulusan yang baik, sehingga kualitas output sangat bergantung pada kualitas input dan proses. Untuk itu, kemandirian sekolah yang akan bermuara pada sekolah mandiri di muhammadiyah menjadi issue yang menarik untuk dibicarakan dilevel nasional sehingga akan muncul kebijakan yang terkait

dengan pengembangan kemandirian sekolah yang mampu dijalankan oleh semua sekolah yang ada di amal usaha muhammadiyah. Tentunya kemandirian yang sejalan dengan karakter dan jati diri muhammadiyah sebagai organisasi publik amar makruf nahi munkar. Hal ini menarik untuk ditelaah dan dikaji secara bersama-sama dan inilah yang menjadi alasan mendasar untuk diangkat dalam artikel ini.

PENDEKATAN & METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengikuti alur kegiatan penelitian pengembangan yang merujuk pada model spiral Cennamo & Kalk (2005:6) yang meliputi penentuan produk yang dikembangkan (*define*), membuat disain produk (*design*), peragaan (*demonstrate*), pengembangan (*develop*), dan penyajian (*delivery*). Namun dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga yakni: (1) tahap pra pengembangan (termasuk di dalamnya adalah: pengumpulan informasi mengenai penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, serta mengkaji literatur dan melakukan observasi lapangan), (2) tahap pengembangan (menyangkut kegiatan: penentuan arah produk, pengembangan, pembuatan rencana model), dan (3) tahap penerapan model (serta di dalamnya: kegiatan uji coba dan implementasi pengembangan, serta diseminasi). Karena artikel ini merupakan bagian dari penelitian disertai pengembangan yang sedang peneliti lakukan dan masih dalam proses penyelesaian, maka artikel ini hanya mengambil kajian dari tahap pra pengembangan yaitu tentang konsep kemandirian sekolah yang muncul di muhammadiyah.

HASIL PENGKAJIAN KEMANDIRIAN SEKOLAH DI MUHAMMADIYAH

A. Konsep Sekolah Mandiri

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 10 menjelaskan bahwa beban belajar untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA,SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing, sedangkan pasal 11 menjelaskan bahwa beban belajar

untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) ditetapkan oleh Peraturan Menteri berdasarkan usul dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pada ayat ini dijelaskan bahwa sekolah khususnya SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sekolah kategori standar dan sekolah kategori mandiri. Pengkategorian ini didasarkan pada tingkat terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. Oleh karenanya, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupaya agar sekolah/madrasah yang berada dalam kategori standar meningkat menjadi sekolah/madrasah kategori mandiri.

Rachmat Wahab (2012) mengatakan bahwa Sekolah Kategori Mandiri (SKM): sekolah yang mampu mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan, potensi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta didik sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sekolah Kategori Mandiri memiliki persyaratan minimal sebagai berikut:

a. Dukungan Internal, mencakup:

- 1) Kinerja Sekolah, ditunjukkan dengan: Terakreditasi A (bagi yang sudah diakreditasi), rerata nilai UN tiga tahun terakhir minimum 7, Persentase kelulusan UN $\geq 90\%$ untuk tiga tahun terakhir, animo tiga tahun terakhir lebih dari daya tampung, prestasi akademik dan non akademik yang dicapai, melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS), jumlah siswa per kelas maksimal 32 orang, ada pertemuan rutin pimpinan dengan guru, ada pertemuan rutin sekolah dengan orang tua.
- 2) Kurikulum, ditunjukkan dengan: memiliki Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang

mencerminkan kurikulum Sekolah Kategori Mandiri, beban belajar dinyatakan dengan Satuan Kredit Semester (SKS), mata pelajaran yang harus diikuti oleh peserta didik dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu wajib (mata pelajaran pokok), pilihan paket, dan pilihan bebas.

- 3) Ketersediaan Panduan pelaksanaan, antara lain: memiliki pedoman pembelajaran, memiliki pedoman pemilihan mata pelajaran sesuai dengan potensi dan minat, memiliki panduan menjajagi potensi peserta didik, memiliki pedoman penilaian.
- 4) Kesiapan sekolah, dalam hal: sekolah menyatakan ingin melaksanakan Sistem Kredit Semester, persentase guru yang menyatakan ingin melaksanakan SKS $\geq 90\%$, pernyataan staf administrasi akademik bersedia melaksanakan SKS, dan kemampuan staf administrasi akademik dalam menggunakan komputer
- 5) Kesiapan Sumber Daya Manusia, antara lain: persentase guru memenuhi kualifikasi akademik $\geq 75\%$, relevansi guru setiap mata pelajaran dengan latar belakang pendidikan (90%), rasio guru dan siswa 1 : 20, jumlah tenaga administrasi akademik sesuai ketentuan, guru bimbingan dan konseling (BK)
- 6) Ketersediaan Fasilitas, yang mencakup: ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang bimbingan, ruang unit kesehatan, tempat olahraga, tempat ibadah, lapangan bermain, komputer untuk administrasi, memiliki laboratorium: (1) bahasa, (2) teknologi informasi/komputer, (3) fisika, (4) kimia, (5) biologi, (6) multimedia, dan (7) IPS, perpustakaan memiliki koleksi buku setiap mata pelajaran dan dikelola, dan layanan bimbingan dan konseling.

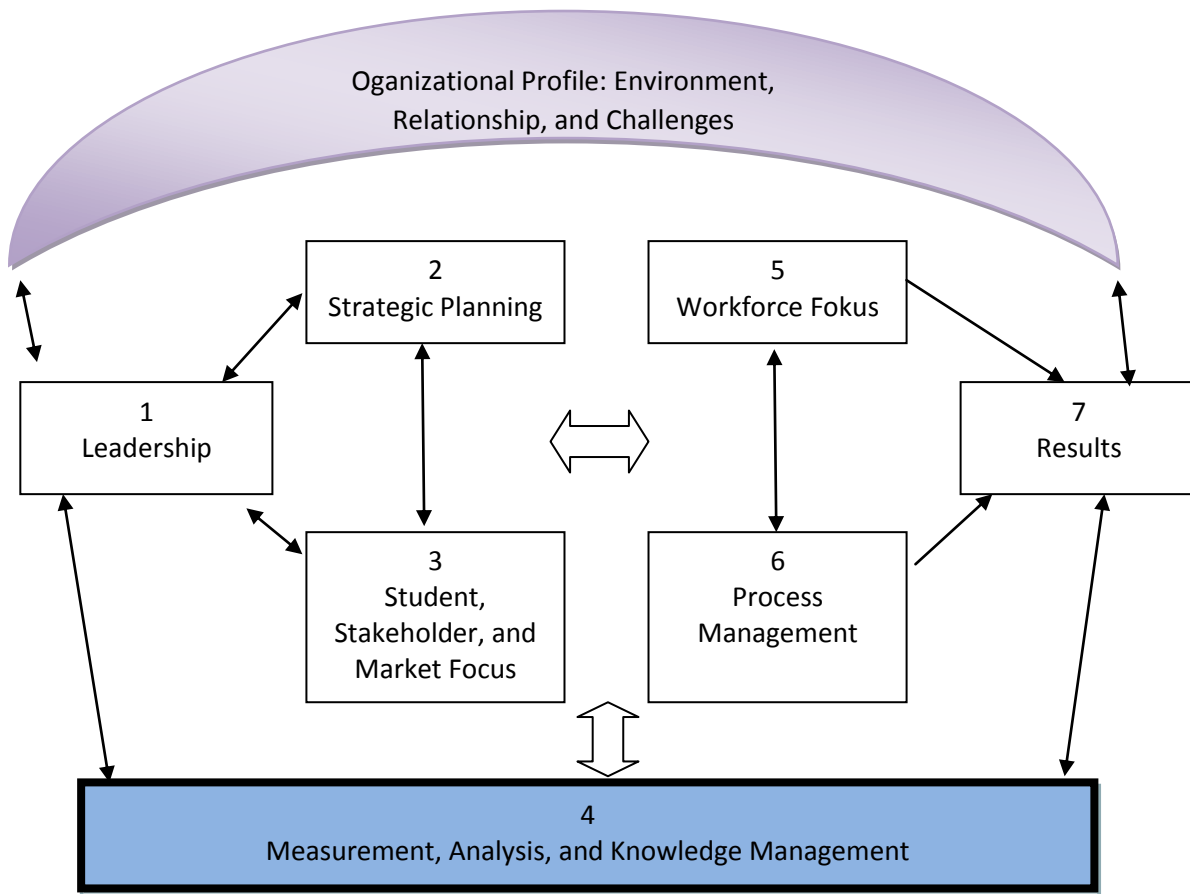
b. Dukungan Eksternal, terdiri dari:

Dukungan dari komite sekolah, persentase orang tua yang menyatakan bersedia putranya mengikuti pembelajaran dengan SKS ≥ 60 %, dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota secara tertulis (kebijakan dan fasilitas / pembiayaan), dan dukungan tenaga pendamping / narasumber dalam keseluruhan proses pengembangan dan pelaksanaan SKM.

Sekolah mandiri merupakan sekolah yang berkualitas, karena menerapkan proses pendidikan yang banyak didukung oleh seluruh komponen-komponen sekolah. Jan (Eddy Sutadji, 2009:58-59) mengatakan bahwa sekolah yang berkualitas memiliki lima kriteria, yaitu: 1) *Supporting Inputs* (Faktor-faktor pendukung): *strong parent and community support* (dukungan orang tua dan masyarakat), *effective support from the education system* (efektivitas sistem pendidikan), *adequate material support* (bahan ajar yang memadai), *frequent and appropriate teacher development actives* (pengembangan kemampuan guru yang sesuai), *sufficient text books and other materials* (jumlah buku yang cukup), dan *adequate facilities* (fasilitas yang memadai); 2) *Enable Condition* (kondisi yang memungkinkan): *effective leadership* (kepemimpinan yang efektif), *acceptable teaching force* (angkatan kerja mengajar), *facility and authority* (fasilitas dan kewenangan), dan *hight time in school* (waktu belajar yang maksimal di sekolah); 3) *School Climate* (suasana sekolah): *hight expert time of student* (keahlian dalam pengaturan jadwal), *possitive teacher attitude* (sikap positif guru), *order and discipline* (disiplin dan tertib), *organized curriculum* (organisasi kurikulum), dan *reward and incentive* (insentif dan penghargaan); 4) *Teaching Learning Process* (Proses belajar mengajar): *high learning fine* (pengajaran yang bermutu), *variety and teaching strategies* (variasi metode mengajar), *frequent home work* (frekuensi pekerjaan rumah), dan *frequent student achievement and feed back* (frekuensi prestasi siswa dan umpan balik); 5) *Student outcomes* (hasil belajar siswa):

participation (partisipasi), *academic achievement* (prestasi akademik), *social skill* (ketrampilan sosial), dan *economic support* (dukungan ekonomi).

Sekolah yang bisa dikategorikan mandiri juga merupakan wujud dalam *school efectiveness*, dan sekolah yang efektif merupakan sekolah yang unggul. Baldrige (2008) memberikan tujuh kategori yang harus dimiliki sekolah efektif agar dapat terwujud, yaitu: (1) *leadership*, (2) *strategic planning*, (3) *student, stakeholder, and market focus*, (4) *measurement, analysis, and knowledge management*, (5) *workforce fokus*, (6) *process management*, and (7) *results*. Jika dibuat skema konsep baldrige dapat diperjelas pada gambar 4 sebagai berikut:



Gambar 4. *Baldrige education criteria for performance excellence framework a system perspective*
(Sumber: Baldrige, 2008)

Konsep Baldrige ini memiliki keunggulan jika diimplementasikan dalam rangka pengembangan sekolah bermutu, (1) lebih fleksibel untuk digunakan dalam dunia pendidikan maupun bisnis, (2) menggunakan proses selain hasil, (3) menetapkan kriteria mutu yang sangat jelas dan komprehensif, (4) variabel-variabelnya dapat diukur melalui kriteria yang ada, (5) kriteria mutu yang dikembangkan cukup holistik dan kontekstual. Kriteria mutu yang dikembangkan oleh baldrige ada tujuh, yaitu: *leadership, information and analysis, strategic quality planning, human resource development and management, management of process quality, quality and operational result, client focus and satisfaction.*

B. Ide Pengembangan Kemandirian Sekolah Muhammadiyah

Wacana sekolah mandiri mengemuka sejak periode Muktamar 1995-2000, saat era kepemimpinan Amien Rais. Dalam salah satu butir rekomendasi Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tercantum alasan mengapa sekolah mandiri mendesak di lingkungan muhammadiyah. Butir rekomendasi itu berbunyi, *“mengingat akhir-akhir ini sangat ramai dibicarakan masalah sekolah mandiri, yang menandakan ada ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kualitas sekolah (termasuk sekolah-sekolah dasar muhammadiyah) yang ada sekarang ini, karena apa yang ditawarkan dan diberikan oleh sekolah tidak sesuai dengan yang mereka harapkan.”* Pimpinan Pusat (PP) muhammadiyah sendiri terlihat sangat antusias dan serius

menangani masalah ini. Beberapa kali PP Muhammadiyah Majelis Dikdasmen memfasilitasi pertemuan para kepala sekolah dalam rangka merumuskan format ideal sekolah mandiri Muhammadiyah, seperti pertemuan di Yogyakarta Maret 2004 dan tanggal 20-22 Agustus 2004 di Surabaya. Menyongsong Muktamar Muhammadiyah di Malang, PP Muhammadiyah Majelis Dikdasmen menggelar Olimpiade Matematika bagi sekolah Muhammadiyah se-Indonesia untuk memotivasi pengembangan sekolah-sekolah mandiri Muhammadiyah terutama di mata pelajaran sains dan matematika.

Muhammadiyah dalam kebijakan yang dirumuskan dalam Muktamar di Malang tahun 2005 tentang mutu pendidikan, menjadi hal mendasar yang harus disegerakan oleh sekolah Muhammadiyah. Salah satu terobosan program yang digulirkan adalah pengembangan sekolah mandiri. Sekolah Kategori Mandiri (SKM) yang dikehendaki Muhammadiyah adalah sekolah yang mampu mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan, potensi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta didik sehingga menghasilkan

lulusan yang berkualitas. Pengelola pendidikan dasar Muhammadiyah dituntut agar menciptakan kondisi sekolah dasar Muhammadiyah menjadi sekolah yang mandiri. Tuntutan ini mengisyaratkan tantangan, peluang, dan prospek yang bisa diatasi dan dioptimalkan demi kemajuan Muhammadiyah sendiri sebagai organisasi sosial kemasyarakatan maupun institusi pendidikan.

Pengembangan kemandirian sekolah atau sekolah mandiri Muhammadiyah tidak akan bisa terimplimentasi jika tidak ada kebijakan sekolah tentang hal tersebut. Kebijakan merupakan langkah awal yang merupakan strategi pembuka untuk mewujudkan sekolah yang bermutu. Zamroni (2005:2-4) menyebutkan bahwa strategi kebijakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dapat dipilih strategi yang menekankan hasil/kualitas lulusan (*the output oriented strategy*), strategi yang menekankan proses (*the process oriented strategy*), dan strategi komprehensif (*the comprehensive strategy*). Ketiga strategi tersebut dijelaskan oleh Arief Rohman & Teguh Wiyono, (2010:14) dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2. Strategi Alternatif Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan

Strategi	Deskripsi	Kelebihan	Kelemahan
Strategi yang menekankan hasil (<i>the output oriented strategy</i>)	Bersifat <i>top-down</i> berasal dari pusat. Contoh SKL dan SKD	Sasaran jelas dan umum, ada pedoman, pengendalian, pengontrolan, dll.	Kesenjangan mutu semakin kuat antar sekolah
strategi yang menekankan proses (<i>the process oriented strategy</i>)	Bersifat <i>bottom-up</i> , mulai dari sekolah	Inisiatif dari sekolah, muncul semangat dan kekuatan dari sekolah, dll	Arah dan kualitas sekolah tidak seragam, sulit untuk melihat dan meningkatkan kualitas secara nasional
strategi komprehensif (<i>the comprehensive strategy</i>)	Kombinasi sifat <i>top-down</i> dan <i>bottom-up</i> . Tujuannya bersifat nasional tetapi cara mencapainya sesuai dengan kondisi lokal. Contoh: Standar	Sekolah memiliki kekuasaan dan otoritas yang besar untuk mencapai standar hasil yang maksimal. Muncul inovasi kegiatan di	Sekolah yang tidak dapat memenuhi standar nasional harus berusaha keras untuk dapat memenuhinya

	nasional, MBS, KTSP.	sekolah.	
--	----------------------	----------	--

Atas dasar pendekatan dan strategi kebijakan di atas, maka aneka kebijakan nyata secara strategis banyak dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan berujung peningkatan mutu pendidikan, seperti: kebijakan yang menyangkut KTSP, akreditasi sekolah, BOS, akses buku melalui e-books, pengembangan kultur sekolah, perbaikan manajemen sekolah, UAN, sekolah berstandar internasional, peningkatan mutu guru, dan lain sebagainya (Arief Rohman & Teguh Wiyono, 2010:14).

Kebijakan pengembangan sekolah mandiri muhammadiyah (PSMM) muncul juga didasarkan pada acuan pemerintah khususnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah yang menuntut pembangunan pendidikan dioptimalkan di daerah. Dengan mengacu pada rintisan pelaksanaan desentralisasi pendidikan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1999 kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang menekankan bahwa wewenang paling besar untuk sektor pendidikan prasekolah sampai pendidikan menengah atas adalah urusan pemerintah kabupaten atau kota, sehingga setiap kebijakan yang akan dibuat harus mengacu pada empat hal pokok, yakni: 1) peningkatan mutu, 2) efisiensi keuangan, 3) efisiensi administrasi, dan 4) perluasan kesempatan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, persyarikatan muhammadiyah pada muktamar 2005 di Malang, dalam rangka untuk peningkatan mutu pendidikan di amal usaha muhammadiyah, maka digulirkannya kebijakan pengembangan sekolah mandiri muhammadiyah.

C. RUMUSAN KEMANDIRIAN SEKOLAH MUHAMMADIYAH

Pengembangan sekolah di amal usaha muhammadiyah mengacu pada empat hal, di antaranya: (1) mengembangkan lingkungan pendidikan yang berorientasi pada iman, ilmu, dan amal; (2) mengembangkan kurikulum yang menekankan pada perpaduan antara ilmu umum dan ilmu agama; (3) melandaskan

sistem pendidikan dengan semangat belajar "siapa menanam mengetam"; dan (4) bersemboyan pada "mandiri dan hidup-hidupilah muhammadiyah, jangan mencari kehidupan di muhammadiyah."

Dalam rangka mewujudkan sekolah mandiri di lingkungan amal usaha muhammadiyah maka proses pendidikan yang bermutu harus berlandaskan pada orientasi akademik. Orientasi akademik yang dimaksud untuk menciptakan proses pembelajaran yang inovatif, kreatif, efektif, efisien, dan berdaya saing. Bagian ini dimulai dari sebuah pesan KH Ahmad Dahlan yang mengatakan, "Hendaklah kamu jangan sekali-kali menduakan pandangan muhammadiyah dengan perkumpulan lain." Pesan ini menjadi penting dan harus direnungkan oleh seluruh jajaran persyarikatan dan AUM, tanpa kecuali, mengingat KH Ahmad Dahlan (1868-1923) adalah tipe *man of action*, pencari kebenaran haqiqi dan pencerah akal. Sedikitnya ada tiga kalimat kunci yang menggambarkan tingginya minat KH Ahmad Dahlan Kyai dalam pencerahan akal, yaitu: (1) pengetahuan tertinggi adalah pengetahuan tentang kesatuan hidup yang dapat dicapai dengan sikap kritis dan terbuka dengan mempergunakan akal sehat dan istiqomah terhadap kebenaran akali dengan didasari hati yang suci; (2) akal adalah kebutuhan dasar hidup manusia; (3) ilmu mantiq atau logika adalah pendidikan tertinggi bagi akal manusia yang hanya akan dicapai hanya jika manusia menyerah kepada petunjuk Allah swt.

Pendidikan muhammadiyah harus menjadi model lembaga pendidikan yang mampu mengakomodasi ideologi muhammadiyah. Tidak dapat disangkal, sekolah-sekolah muhammadiyah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA hingga tingkat perguruan tinggi (PT) sudah mengakomodasi materi ke-muhammadiyah. Untuk mengantisipasi kemungkinan lembaga pendidikan muhammadiyah ditinggalkan, ada beberapa cara yang lebih inovatif agar lembaga

pendidikan diminati masyarakat tanpa meninggalkan ideologi muhammadiyah itu sendiri, di antaranya:

- 1) Mengembangkan sekolah-sekolah muhammadiyah yang inovatif, kreatif, unggul, mandiri dari berbagai sisi (manajemen, proses, maupun aktivitas-aktivitas lain) yang mendukung pencapaian tujuan bersama.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan dengan sistem *full day school* (waktu pembelajaran hingga sore hari) dan menggunakan metode-metode baru dalam pembelajaran.
- 3) Melakukan perumusan filsafat dan pengembangan kurikulum pendidikan alternatif serta modifikasi kurikulum.
- 4) Melakukan tafsiran Al-Qur'an dengan pendekatan sistem, atau tafsir sistem. Satu konsep kunci yang harus dirumuskan, yakni ide fitrah berupa tauhid. Artinya, orientasi filsafat dan kurikulum pendidikan bertitik tolak dari konsep tauhid.
- 5) Menggunakan paradigma pendidikan Islam dengan mengaktualisasikan nilai-nilai tauhid sebagai tujuan yang paling prinsip dan substansial.
- 6) Berikhtiar membangun kurikulum berbasis tauhid (KBT).

Secara normatif, rumusan sekolah mandiri muhammadiyah memiliki tolok ukur: (a) tertib ibadah (al-Islam), (b) mahir baca tulis al-Quran, (c) berwawasan kebangsaan, (d) pengetahuan akademis tinggi, (e) ketrampilan berbahasa asing dan (f) ketrampilan komputer. Namun, dalam implementasinya banyak permasalahan mengemuka, seperti belum adanya titik temu tentang bagaimana wajah sekolah mandiri itu. Enam kriteria normatif mesti diterjemahkan sesuai dengan keadaan masyarakat dan kebutuhan *stakeholders* setempat, sehingga akan melahirkan model-model sekolah mandiri yang sangat heterogen dan bervariasi. Jelasnya, sekolah di dekat pantai berbeda dengan sekolah di pegunungan; sekolah di kota tidak sama dengan sekolah di pedesaan, meskipun sama-sama sekolah mandiri muhammadiyah. Jadi, wajah sekolah mandiri ala muhammadiyah bercorak

pelangi senafas dengan budaya, geografi, dan demografi setempat.

Di lain sisi, pengelola pendidikan dasar muhammadiyah dituntut agar menciptakan kondisi sekolah dasar muhammadiyah menjadi sekolah yang mandiri. Sekolah mandiri memiliki beberapa ciri: unggul dalam manajemen sekolah, pengembangan kurikulum, improvisasi metode pembelajaran, perbaikan evaluasi, pengadaan tenaga pendidik dan non kependidikan, penggalian dana, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan mutu akademis, kedisiplinan civitas akademik, peningkatan SDM ataupun hal-ihwal lain. Tuntutan ini mengisyaratkan tantangan, peluang dan prospek yang bisa diatasi dan dioptimalkan demi kemajuan muhammadiyah sendiri sebagai organisasi sosial kemasyarakatan maupun institusi pendidikan. Salah satu solusinya, dengan memanfaatkan terobosan-terobosan yang berkaitan erat dengan konsep dan program sekolah mandiri, seperti manajemen berbasis sekolah. Bagaimana mengelola sekolah menjadi institusi mandiri mengacu sekolah itu sendiri menjadi persoalan penting, sehingga impelementasi manajemen berbasis sekolah menjadi syarat mutlak untuk menuju sekolah mandiri.

Mengingat sekolah mandiri menuntut kesungguhan dan kerja keras. Motivasi dan kerja yang setengah-setengah dalam mengejar kemandirian akan percuma dan berbuah kegagalan. Sikap mental yang tepat untuk memulai sesuatu, berangkat dari perenungan mendalam dan matang, kebutuhan mendesak, harapan dan optimisme masa depan, kemauan untuk berubah dan memperbaiki diri, mutlak perlu. Sikap mental adalah bagian dari psikologi diri dan kepribadian manusia.

Dalam konteks sekolah mandiri muhammadiyah dengan konsep manajemen berbasis sekolah, sikap mental ini amat penting. Ia mencakup beragam elemen dan aspek lain, bukan sekedar pengelolaan sekolah semata. Terlebih, berkenaan psikologi pendidikan Islami, sikap mental yang tepat dalam mengelola sekolah mandiri ala muhammadiyah ini menjadi prasyarat mendasar yang penting. Diakui atau tidak,

ada beda perspektif mengenai sikap mental yang tepat dalam mengelola sekolah mandiri, merujuk psikologi pendidikan sekuler dan Islami. Artinya, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai psikologi pendidikan yang selalu berdasarkan studi intelektual ilmiah dan psikologi pendidikan yang menerapkan ajaran-ajaran Islam. Alhasil, ramuan atau kombinasi yang paling ideal dan proporsional untuk menciptakan sekolah mandiri muhammadiyah, dengan memanfaatkan kekayaan khazanah yang ada, yang merupakan temuan-temuan sekaligus kontribusi riil perkembangan intelektual ilmiah bernafaskan agama Islam, mesti dimengerti dan disamakan terlebih dahulu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengkajian dan penelaahan secara teoritis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kemandirian sekolah yang berupa sekolah mandiri muhammadiyah dapat terwujud apabila diawali dengan adanya kebijakan kepala sekolah untuk peningkatan daya kemandirian sekolah yang mengarah pada peningkatan mutu.
2. Tolok ukur kemandirian dalam sekolah mandiri versi muhammadiyah adalah (a) tertib ibadah (al-islam), (b) mahir baca tulis al-quran, (c) berwawasan kebangsaan, (d) pengetahuan akademis tinggi, (e) ketrampilan berbahasa asing dan (f) ketrampilan komputer.
3. Wujud kemandirian dalam manajemen sekolah muhammadiyah berupa kemandirian kurikulum, kegiatan belajar mengajar, tenaga pendidik dan kependidikan, pembiayaan, dan fasilitas sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rohman & Teguh Wiyono. (2010). *Education policy in decentralization era*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar.
- Baldrige. (2008). *Education criteria for performance excellence*. National Institute of Standards and Technology: Department of Commerce.

- Cennamo K., & Kalk, D. (2005). *Real world instructional design*. Thomson Learning, Inc.
- M. Dawam Rahardjo (ed.). (1997). *Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Internasa.
- Muhammad Munadi & Barnawi. (2011). *Kebijakan publik di bidang pendidikan*. Yogyakarta : Ar- Ruzz Media.
- Mohamad Ali dan Marpuji Ali. (2005). *Mazhab al-maun: Tafsir ulang praksis pendidikan muhammadiyah*. Yogyakarta: Apeiron philotes.
- _____. (2007). Makalah: *Filsafat Pendidikan Muhammadiyah: Tinjauan Historis dan Praksis*.
- Rachmat Wahab. (2012). Strategi pengembangan sekolah mandiri. Diambil tanggal 12 Desember 2012, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/rochmat-wahab-mpd-ma-dr-prof/strategi-pengembangan-sekolah-kategori-mandiri.pdf>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Bandung: Fokusmedia.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Bandung: Citra Umbara.
- Zamroni. (2007). *Meningkatkan mutu sekolah: Teori, strategi, dan prosedur*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.